

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 10 JANUARI - 13 MARET 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 10 Januari – 16 Februari 2023
dan Masa Reses Mulai Tanggal 17 Februari 2023 – 13 Maret 2023)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. Kinerja Fungsi Legislasi

A. RUU USUL INISIATIF DPR RI

Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran):

Komisi I DPR RI telah menjadikan RUU Penyiaran menjadi RUU Usul Inisiatif Komisi. DPR RI sejak Tahun 2020. Untuk Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Komisi I DPR RI telah melaksanakan kembali Rapat Intern Komisi I DPR RI dengan Tim Asistensi Setjen DPR RI dalam rangka pemaparan Tim Asistensi terkait dengan *draft* dan Naskah Akademik RUU Penyiaran yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB, serta pada tanggal 7 Februari 2023 telah melaksanakan Rapat Intern Panja Perumusan RUU Penyiaran dengan Tim Asistensi RUU Penyiaran Setjen DPR RI dalam rangka Perumusan *Draft* RUU dan Naskah Akademik RUU Penyiaran.

B. RUU USUL PEMERINTAH

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

Komisi I DPR RI mendapat penugasan untuk membahas RUU tentang Perubahan kedua atas UU ITE bersama dengan pemerintah dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat bamus tanggal 9 November 2022 yang didasari oleh Surat Presiden RI Nomor: R-58/Pres/12/2021 tanggal 16 Desember 2021. Dalam hal menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi I DPR RI pada tanggal 25 Januari 2023 telah melaksanakan RDPU dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Pakar/Akademisi sebagai berikut:

- 1) Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. (UNPAD);
- 2) Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum– UI);
- 3) Dr. Helni Mutiarsih Jumhur (Pakar Kebijakan ICT-Telkom University).



Setelah melaksanakan RDPU dengan para Pakar/Akademisi tersebut diatas, pada hari Senin, 10 Februari 2023, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo, Menkumham) dalam rangka mendapatkan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ini, Sekretariat Komisi I DPR RI telah menerima DIM Sandingan dari Fraksi-Fraksi yang telah dikompilasi dan disampaikan kepada pemerintah dalam raker Komisi I DPR RI pada tanggal 13 Februari 2023.

C. RUU KUMULATIF TERBUKA

- a) **RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*):**

Menindaklanjuti penugasan yang diberikan kepada Komisi I DPR RI dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 23 Mei 2022 yaitu untuk membahas RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan semua Orang dari Penghilangan paksa bersama-sama Pemerintah yang didasari dari Surat Presiden RI Nomor: R-21/Pres/04/2022 tanggal 27 April 2022. Dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) untuk mendengarkan penjelasan Plt. Dirjen Hak Asasi Manusia Kemkumham, Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu, Plt. Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemkumham, Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, dan Deputi V KSP Bidang Polhukhankam dan HAM terkait dengan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance / CPED*) yang dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam pembahasan.



b) **RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence*):**

Komisi I DPR RI mendapatkan penugasan dari hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 9 November 2022 untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama-sama Pemerintah sesuai dengan amanat dari Presiden RI Nomor: R-45/Pres/09/2022 tanggal 20 September 2022. Setelah menerima penugasan tersebut, Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 November 2022 untuk memutuskan membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Intern tersebut, pada hari Senin, 6 Februari 2023 Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dengan para Pakar/Akademisi yaitu:

- 1) Drs. Makmur Keliat, Ph.D. (HI UI)
- 2) Drs. Teuku Rezasyah, MA., Ph.D. (HI UNPAD)
- 3) Mayjen TNI Dr. Jonni Mahroza S.I.P., M.Sc. (Warek I UNHAN)
- 4) Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor UNJANI)



masukan dan pandangan dari Pakar/Akademisi dalam RDPU tersebut di atas akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence*) bersama dengan Pemerintah.

c) RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Komisi I DPR RI membahas Penugasan dari Hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 9 November 2022 dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 November 2022 yang didasari dari Surat Presiden RI Nomor: R-48/Pres/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022. Hasil Rapat Intern Komisi I DPR RI tersebut yaitu Komisi I DPR RI melaksanakan RDPU Pada hari Kamis, 9 Februari 2023 dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dengan para Pakar/Akademisi yaitu:

- a. Drs. Muhadi Sugiono, M.A (Peneliti Institute of International Studies (IIS)- UGM)
- b. Dr. Intan Inayatun Soeparna S.H. M.Hum. (Pakar Hukum Nuklir- Fakultas Hukum-UNAIR)
- c. Dr. Kusnanto Anggoro (Pengamat Politik-UI)
- d. Dr. Muhammad Rifqi Muna M.Defstud. (Peneliti Pusat Penelitian Politik- LIPI)

RDPU tersebut menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) bersama dengan Pemerintah.

II. Kinerja Fungsi Anggaran

Sesuai dengan penjadwalan Rapat dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi I DPR RI Pada Masa Sidang III TS. 2022-2023 belum ada penjadwalan Rapat-rapat dari Badan Anggaran.

III. Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Raker/RDP Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja komisi I DPR RI, Pada Masa Sidang III TS. 2022-2023 Komisi I DPR RI :

- A. Pada hari Selasa, 24 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI dan LPP RRI dengan agenda: Penguatan Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Edukasi Politik Masyarakat dan Upaya Strategis Berkelanjutan terkait Siaran *Multiplatform*.



- B. Pada hari Senin, 30 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, telah melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menlu RI untuk membahas Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, dan Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri.



- C. Pada hari Kamis, 2 Februari 2023 pukul 10.00 WIB, telah melaksanakan Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI untuk membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua, dan pemenuhan Kebutuhan Alutsista TNI, rapat dilaksanakan dengan sifat tertutup.



2. Uji Keputusan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Intern untuk menyetujui pelaksanaan Rapat Kerja dengan Kemkominfo RI untuk membahas pembentukan Panitia Seleksi. Setelah Rapat tersebut dilaksanakan Komisi I DPR RI bersurat kepada Menkominfo RI untuk membentuk Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 dan menyampaikan proses tahapan rekrutmen kepada Komisi I DPR RI. Untuk memastikan agar proses pembentukan Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 tetap berjalan, Komisi I DPR RI melaksanakan Raker dengan Menkominfo RI pada tanggal 22 Maret 2022 serta melaksanakan RDP dengan Pansel pada tanggal 19 Mei 2022.

Pada tanggal 26 Agustus 2022, Komisi I DPR RI telah menerima tembusan surat dari Menkominfo yaitu Surat R-791/M.KOMINFO/KP.03.01/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Usulan Nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2022-2025. Setelah Pimpinan DPR RI melaksanakan rapat tanggal 9 November 2022, Pimpinan DPR RI memutuskan untuk meneruskan Surat Penyampaian Usulan Nama Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 kepada Komisi I DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut dari Komisi I DPR RI adalah melaksanakan 10. Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 November 2022 memutuskan untuk melaksanakan Uji Keputusan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Uji keputusan dan Kelayakan terhadap 27 (dua puluh tujuh) Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 dilaksanakan dengan alokasi waktu sebagai berikut:

- a) Tanggal 13-17 Januari 2023: Pemberitahuan kepada publik untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 melalui media cetak dan elektronik.
- b) Tanggal 18-19 Januari 2023: Uji Keputusan dan Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025.

Setelah melaksanakan Uji keputusan dan Kelayakan tersebut, Komisi I DPR RI melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah dan pada Rapat Paripurna tanggal 7 Februari 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Februari 2023 telah menyepakati dan menetapkan 9 (sembilan) Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 dengan nama yaitu:

- 1) Aliyah
- 2) Amin Shabana
- 3) Evri Rizqi Monarshi
- 4) I Made Sunarsa

- 5) Mimah Susanti
- 6) Mohammad Reza
- 7) Muhammad Hasrul Hasan
- 8) Tulus Santoso
- 9) Ubaidillah

3. Uji Kelayakan (*fit and propertest*) dalam rangka memberi pertimbangan Calon Dubes RI (LBBP) untuk Negara Sahabat

Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 Desember 2022 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Negara Sahabat, sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R-56/Pres/11/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat. Selanjutnya dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 24 Januari 2023 telah memutuskan pembahasan Mekanisme dan Penjadwalan Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023.

Pemberian pertimbangan ini dilaksanakan bertahap dalam 3 Sesi, Sesi I dimulai pukul 10.30 – 12.30 (5 orang Calon), Sesi II dimulai pukul 13.30 – 15.00 (4 orang Calon), dan Sesi III dimulai pukul 15.30 – 17.00 (4 orang Calon). Selanjutnya, Komisi I DPR RI telah menyampaikan hasil pemberian pertimbangan tersebut kepada Pimpinan DPR RI.

4. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI

- a. Pada hari Senin, 16 Januari 2023, Panja Alutsista TNI dan Panja Kesejahteraan Prajurit TNI telah melaporkan hasil kerjanya di dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk selanjutnya dijadikan rekomendasi Komisi I DPR RI dan disampaikan kepada Mitra Kerja terkait.
- b. Panja BUMNIP (Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan) telah melaksanakan Rapat Intern untuk menyusun Rencana Kegiatan Panja BUMNIP.
- c. Pada tanggal 17 Januari 2023, Panja Evaluasi G20 telah melaksanakan Rapat Intern dengan agenda Menyusun Rencana Kerja Panja Evaluasi G20 Komisi I DPR RI.

5. Kunker Komisi I DPR RI

1. Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 26 – 28 Januari 2023 ke daerah :

- 1) Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka mengetahui Kesiapan Korem 072/Pamungkas dalam Melaksanakan Tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan Dukungan Alutsista, Personil, Sarana, dan Prasarana serta Kesejahteraan Prajurit;



- 2) Manado, Provinsi Sulawesi Utara, ke Lantamal VIII Manado dalam rangka mewujudkan Keamanan Wilayah Laut yang Tangguh terhadap Berbagai Kerawanan dan Ancaman dengan Dukungan Alutsista, Sarana-Prasarana, dan Kesejahteraan Prajurit;



- 3) Solo, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka mengetahui Kesiapan Korem 074/Warastratama dalam Melaksanakan Tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan Dukungan Alutsista, Personil, Sarana, dan Prasarana serta Kesejahteraan Prajurit.



2. **Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI tanggal 3 – 5 Februari 2023** dalam rangka untuk mengetahui Langkah Strategis Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Timur dalam Melindungi dan mengelola Data Pribadi di Era Siber, ke daerah:

1) Denpasar, Provinsi Bali;



2) Surabaya, Provinsi Jawa Timur;



3. **Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023:**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI (Badan Intelijen Daerah) di daerah, pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 melakukan pengawasan ke daerah:

- 1) Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 17 – 20 Februari 2023 dalam rangka untuk mengetahui Deteksi dini dan cegah dini tahapan pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di Aceh, Deteksi dini dan cegah dini situasi terkini di Aceh, dan Deteksi dini dan cegah dini 17 tahun paska perdamaian di Aceh.
- 2) Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 – 20 Februari 2023 dalam rangka untuk mengetahui Deteksi dini dan cegah dini tahapan pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di Sumatera Barat, dan Deteksi dini dan cegah dini situasi terkini di Sumatera Barat.
- 3) Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 – 20 Februari 2023 dalam rangka untuk mengetahui Deteksi dini dan cegah dini tahapan pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024 di Nusa Tenggara Barat; dan Deteksi dini dan cegah dini situasi terkini di Nusa Tenggara Barat.

2. **Kunjungan Luar Negeri Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023**

Dalam rangka Pengawasan Komisi I DPR RI terhadap Mitra Kerja Komisi I DPR RI di luar negeri, yaitu Perwakilan RI di Luar Negeri terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN serta pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan R.I., yaitu ke:

- 1) Stockholm, Negara Swedia pada tanggal 2– 8 Maret 2023;
- 2) Roma, Negara Italia pada tanggal 2– 8 Maret 2023;
- 3) Los Angeles, Negara Amerika Serikat pada tanggal 7 – 13 Maret 2023.

IV. **PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

	<p>Jakarta, 14 Maret 2023 KABAGSET. KOMISI I DPR RI,</p> <p><u>SARTOMO, S.S., M.Si.</u> NIP. 196808111996031001</p>
--	--